



Penyelesaian Sengketa Umat Beragama Berbasis Moderasi Beragama di Kota Pekalongan Studi Kasus Kerusuhan November 1995

Amrina Rosyada

amrina.rosyada23118@mhs.uingusdur.ac.id

UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

Wahyu Sukma Dewi

wahyu.sukma.dewi@mhs.uingusdur.ac.id

UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

Ayu Dwi Srikanthi

ayu.dwi.srikanthi@mhs.uingusdur.ac.id

UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

Achmad Tubagus Surur

ahmad.tubagus.surur@uingusdur.ac.id

UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen, Kab Pekalongan 51161, Tlp. (0258) 4125775

Korespondensi penulis: Amrina.rosyada23118@mhs.uingusdur.ac.id

Abstrak. *Settlement of Religious Disputes Based on Religious Moderation in Pekalongan City Case Study of November 1995 Riots, the author discusses the problem of how the Role of Religious Moderation in resolving inter-religious conflicts that occurred in Pekalongan City in the November 1995 riots. This research was conducted to obtain an analysis of religious disputes through a qualitative method with a case study approach. The conflict involved ethnic Chinese and indigenous Javanese. With the conditions where the majority of Perkalongan residents are Muslims who have a high religious level. When a Chinese man who was rumored to have torn and urinated on the Qur'an made the Muslim Javanese ethnic angry, resulting in riots for 3 days. This incident was motivated by several factors such as political, social, and economic differences that caused latent conflict (a situation that seems like there is no conflict, but there are actually many problems hidden and classified as difficult to handle). This was triggered by the presence of an ethnic Chinese person who was suspected of having a mental disorder (ODGJ). This led to a riot in Pekalongan City on November 22-24, 1995. The incident was handled by the Pekalongan city government, security forces, and the local community.*

Keywords: *Dispute Resolution, Religious Moderation, Religious People*

Abstrak. Penyelesaian Sengketa Umat Beragama Berbasis Moderasi Beragama di Kota Pekalongan Studi Kasus Kerusuhan November 1995 ini, penulis membahas permasalahan tentang bagaimana Peran Moderasi Beragama dalam menyelesaikan konflik antarumat beragama yang terjadi di Kota Pekalongan pada kerusuhan November 1995. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan analisis tentang sengketa umat beragama melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Konflik ini menyangkut etnis Tionghoa (Cina) serta Pribumi (etnis Jawa). Dengan adanya kondisi dimana masyarakat warga Perkalongan yang mayoritas beragama Islam yang memiliki tingkat religius tinggi. Ketika seorang Tionghoa yang dikabarkan menyobek dan mengencingi Al-Qur'an membuat etnis Jawa yang beragama Islam marah sehingga mengakibatkan keriuhan selama 3 hari. Peristiwa ini dilatarbelakangi adanya beberapa faktor seperti faktor perbedaan politik, sosial, serta ekonomi yang menjadi penyebab terjadinya konflik yang laten (keadaan yang seperti tidak terdapat konflik, tetapi sebenarnya terdapat banyak persoalan didalamnya yang tersembunyi dan tergolong sulit ditangani). Hal ini dipicu oleh adanya seseorang etnis Tionghoa (cina) yang ternyata diduga mengalami gangguan jiwa (ODGJ). Sehingga hal tersebut bisa sampai membuat kerusuhan di Kota Pekalongan pada 22-24 November 1995 pada saat itu. Peristiwa tersebut ditangani oleh pemerintah kota Pekalongan, pihak keamanan, serta masyarakat setempat.

Kata Kunci: *Moderasi Beragama, Penyelesaian sengketa, Umat Beragama*

PENDAHULUAN

Kota Pekalongan adalah kota yang dihuni oleh orang yang tidak hanya memiliki satu agama saja, tetapi ada berbagai macam agama, adat dan budaya, yang dimiliki oleh warga kota Pekalongan. Kota Pekalongan dikenal sebagai kota santri, yaitu kota dengan tingkat religiusnya yang tinggi, tercatat pada Kantor Departemen Agama Kota Pekalongan hingga tahun 1995 terdapat 71 buah masjid dan 562 mushola, selain itu terdapat banyak pondok pesantren yang berdiri terdapat 10 buah dengan 1.414 santri. Dibandingkan dengan jumlah gereja di Kota Pekalongan yang berjumlah 10, Pura 1, Vihara 4, dan Klenteng 1, jumlah rumah ibadah umat Muslim sangat banyak (BPS Kota Pekalongan 1995). Salah satu kerusuhan yang melibatkan etnis Tionghoa dan Pribumi terjadi di Kota Pekalongan pada hari Rabu tanggal 22 November 1995 yang dikenal dengan isu merobek dan mengencingi Al-qur'an kitab suci agama Islam. Hal ini memicu konflik terhadap warga kota Pekalongan pada saat itu. Mendengar kabar itu warga Jawa yang beragama Islam memanas karena merasa agamanya diinjak-injak mereka akhirnya memuaskan amarahnya dengan cara merusak toko dan rumah etnis Tionghoa di Jalan Hayam Wuruk yaitu tempat terjadinya penyobekan Kitab Suci Al Qur'an, walaupun pelaku penyobekan ternyata merupakan penderita gangguan jiwa yang belum lama keluar dari rumah sakit jiwa, akan tetapi kerusuhan terus terjadi sehingga menimbulkan resiko buruk bagi masyarakat Kota Pekalongan, dampak politik, ekonomi, maupun sosial (Rahayu & Sodik, 2016).

Mengapa penulis membuat artikel ini karena dengan keadaan tingkat sosial yang tinggi serta berbeda-beda agama ini mengakibatkan rentan terhadap isu yang berhubungan dengan agama. Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan artikel yang sudah ada sebelumnya. Karena isu ini sudah mencapai tahap internasional pada saat itu, sehingga penulis tertarik untuk mengambil topic terjadinya penyobekan dan pengencingan Al-Qur'an pada hari Rabu tanggal 22 November 1995. Solusi dari permasalahan ini dengan memastikan apakah pelaku tersebut benar benar gangguan jiwa, jika iya maka segera dibawa ke rumah sakit jiwa untuk pengobatan. Dan masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan karena pelaku yang merupakan Orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) yang memang hal tersebut membuat orang tidak bisa beretika dan berfikir. Maka dari itu penulis menulis artikel yang bertema "Penyelesaian Sengketa Umat Beragama Berbasis Moderasi Beragama Di Kota Pekalongan Studi Kasus Kerusuhan November 1995".

Artikel ini akan membahas masalah yaitu tentang bagaimana peran moderasi beragama dalam menyelesaikan konflik antarumat beragama yang terjadi di kota Pekalongan pada kerusuhan November 1995. Faktor-faktor apa saja yang memicu terjadinya kerusuhan agama di Pekalongan pada tahun 1995. Serta Bagaimana pendekatan berbasis moderasi beragama dapat mencegah konflik serupa di masa depan serta artikel ini membahas bagaimana respon masyarakat dan pemerintah dalam menyelesaikan sengketa antarumat beragama selama dan setelah kerusuhan November 1995 di Pekalongan.

Berdasarkan Latar belakang serta rumusan masalah diatas yaitu bagaimana Penyelesaian Sengketa Umat Beragama Berbasis Moderasi Beragama Di Kota Pekalongan Studi Kasus Kerusuhan November 1995. Penelitian ini bertujuan untuk memahami cara penyelesaian konflik antarumat beragama di Kota Pekalongan dengan menggunakan pendekatan moderasi beragama, terutama terkait dengan kerusuhan yang terjadi pada November 1995. Adapun tujuan spesifik penelitian ini meliputi menelusuri faktor-faktor yang memicu kerusuhan antarumat beragama di Kota Pekalongan pada peristiwa November 1995. Mengkaji peran pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat dalam menyelesaikan konflik dengan pendekatan moderasi beragama. Mengukur efektivitas strategi dan metode penyelesaian konflik berbasis moderasi beragama dalam menjaga kerukunan umat beragama setelah terjadinya kerusuhan. Memberikan rekomendasi untuk

kebijakan lokal dan nasional terkait moderasi beragama guna mencegah dan mengatasi potensi konflik keagamaan di masa mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pendekatan moderasi beragama dalam penyelesaian konflik keagamaan dan dampaknya terhadap stabilitas sosial di Kota Pekalongan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk menjaga kerukunan antarumat beragama di Indonesia.

Mengapa Penulis melakukan penelitian ini karena konflik antarumat beragama masih rentan terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Pekalongan. Kerusuhan November 1995 menunjukkan bagaimana perbedaan agama, jika tidak dikelola dengan baik, dapat memicu kekerasan. Moderasi beragama menawarkan solusi alternatif untuk mencegah dan menyelesaikan konflik melalui sikap saling menghargai dan menjaga keseimbangan sosial. Penelitian ini diharapkan mengidentifikasi praktik terbaik dalam penyelesaian sengketa berbasis moderasi beragama, yang dapat dijadikan referensi untuk kebijakan preventif yang lebih efektif. Selain itu, studi ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mencegah radikalisme dan ekstremisme, serta akan berkontribusi pada pengembangan kebijakan publik.

KAJIAN TEORITIS

1. Pengertian Moderasi Beragama

Moderasi beragama adalah jenis-jenis pendekatan yang mendorong tindakan, sikap, dan pandangan dari moderat, adil, dan seimbang serta mengidentifikasi ekstrema dalam beragama. Pendekatan yang mendorong tindakan, sikap, dan pandangan yang moderat, adil, dan seimbang serta mengidentifikasi ekstrem dalam beragama. Agama dan budaya adalah dua hal yang berbeda namun tidak dapat dijelaskan. Mereka memiliki hubungan yang dapat menciptakan keharmonisan dan konflik. Mereka tidak dapat dihilangkan sepenuhnya dan dialektika sekuler mempunyai simbol, pola, dan makna yang berbeda (Riady, 2021). Keduanya bukan ancaman yang perlu dituliskan namun mampu memberi warna dan semangat pada kebudayaan, agama juga harus mampu memberi kekayaan. Lebih jauh lagi, agama dan budaya sering kali dipandang negatif oleh masyarakat umum karena didasarkan pada norma masyarakat umum agama, khususnya Islam (Arifai, 2019).

2. Pengertian Sengketa

Sengketa menjadi bagian alami dalam kehidupan sosial manusia, muncul seiring aktivitas mereka yang saling berinteraksi baik sebagai individu maupun kelompok. Kovach menjelaskan bahwa konflik merupakan bentuk perjuangan mental dan spiritual manusia, di mana terjadi perbedaan prinsip, pernyataan, serta argumen yang saling bertentangan.

Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama:

- a) Litigasi (Proses Formal di Pengadilan): Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di pengadilan, di mana pihak-pihak yang terlibat membawa kasus mereka untuk mendapatkan putusan yang memiliki kekuatan mengikat. Proses ini bersifat formal, cenderung memakan waktu lama, dan biayanya cukup besar.

- b) Non-Litigasi (Penyelesaian di Luar Pengadilan): Pendekatan non-litigasi, seperti mediasi, memungkinkan penyelesaian di luar proses peradilan. Dalam mediasi, pihak-pihak yang berselisih dibantu oleh mediator yang netral untuk berdiskusi dan mencapai kesepakatan bersama. Proses ini lebih mengutamakan musyawarah dan mufakat.
- c) Mediasi: Mediasi adalah proses sukarela yang tidak terikat pada aturan formal, di mana para pihak memiliki keleluasaan untuk mencapai kesepakatan tanpa adanya paksaan. Peran mediator hanya membantu menemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa memberikan keputusan
- d) Akta Perdamaian: Jika kesepakatan dicapai melalui mediasi, hasil tersebut dapat dituangkan dalam akta perdamaian yang sah dan memiliki kekuatan hukum menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, akta ini menjadi perjanjian yang mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat. Mediasi menjadi alternatif yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa tanpa harus menempuh proses litigasi yang panjang dan mahal (Boboy et al., 2020).

3. Dalil tentang Persengketaan

Terkait persengketaan atau perselisihan, dalam Islam ada beberapa dalil yang menjelaskan tentang cara menyelesaikan persengketaan dengan adil dan berdasarkan syariat. Salah satunya terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu:

a. Surah An-Nisa' Ayat 59

Terjemahan: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

لِلَّهِ يَشْيءُ قَرْدُوهُ إِلَىٰ آيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي
خَيْرٍ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ

b. Surah Al-Hujurat Ayat 9

Terjemahan: "Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Tetapi jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu hingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."

جِي حَتَّىٰ تَقِيءَ إِلَىٰ آيَاتِنَا الَّتِي تَبَوَّانَ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَدْ
أَفْسَطُوا مِنَ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۚ أَمْرَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَ

Dari ayat-ayat ini, kita diajarkan bahwa dalam menyelesaikan persengketaan, harus dikembalikan kepada aturan Allah dan Rasul-Nya, serta ditegakkan keadilan tanpa memihak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini berfokus pada kasus kerusuhan yang terjadi di Kota Pekalongan pada 22 November 1995, yang dipicu oleh isu keagamaan dan melibatkan etnis Tionghoa. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen, seperti artikel berita, laporan resmi pemerintah, serta literatur akademis yang membahas tentang konflik antar-umat beragama dan moderasi beragama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen, di mana peneliti mengkaji dan menganalisis informasi yang sudah tersedia dari sumber-sumber tersebut. Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran rinci mengenai peristiwa kerusuhan serta langkah-langkah penyelesaian konflik yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Analisis tematik juga digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data, seperti faktor pemicu kerusuhan, respons masyarakat, dan penerapan moderasi beragama.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Moderasi Beragama dalam Menyelesaikan Konflik

Konflik agama sering terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya karena adanya perbedaan status ekonomi, sosial, agama, suku, ras, dan budaya di kota Pekalongan. Untuk mengatasi konflik ini, yang harus dilakukan adalah penguatan pada moderasi beragama di Kota Pekalongan.

Kerusuhan pada Rabu 22 November 1995 dilatarbelakangi oleh Perbedaan agama antar Masyarakat Pekalongan. Masyarakat Pekalongan mayoritas beragama Islam dengan Tingkat religious yang tinggi. Etnis Tionghoa yang termasuk didalam perseteruan yang ada adalah karena adanya peraturan Pemerintah Orde Baru yang diklaim membeda-bedakan etnis Tionghoa di Indonesia. Adanya seorang oknum yang mengalami gangguan jiwa (ODGJ) yang tanpa pengawasan atau penahanan dari pihak berwajib (rumah sakit jiwa) sehingga ODGJ tersebut yang tidak memiliki akal dan pikiran yang sehat berbuat semena mena terhadap apapun salah satunya merobek dan mengencingi Al-quran (Boboy et al., 2020).

Kerusuhan seringkali dipicu oleh berbagai faktor, seperti ketidakadilan sosial yang dihilangkan pada perbedaan identitas, seperti agama, etnis, atau kelas sosial. Faktor pemicunya bisa berupa propaganda, ketidakadilan ekonomi, diskriminasi, atau manipulasi politik. Dalam konteks ini, narasi yang mengasosiasikan identitas tertentu dengan kekerasan atau kebencian dapat memaafkan situasi, menciptakan siklus konflik. Kerusuhan seringkali dipicu oleh berbagai faktor, seperti ketidakadilan sosial, perbedaan identitas, dan provokasi yang berhubungan dengan isu agama dengan konflik sosial. Ketegangan antara kelompok yang berbeda dapat meningkat menjadi kekerasan, terutama ketika ada narasi yang memperkuat polarisasi. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam mengenai moderasi beragama menjadi penting untuk mencegah dan menyelesaikan konflik.

1. Konsep Moderasi Beragama yang relevan dengan penyelesaian konflik Moderasi beragama Merujuk pada pendekatan yang mengedepankan toleransi, dialog, dan sikap saling menghormati antarumat beragama. Konsep ini menekankan pentingnya pemahaman bahwa setiap agama memiliki nilai-nilai yang mendorong perdamaian dan persatuan. Dengan pendekatan moderat, individu dan kelompok diharapkan dapat menghindari ekstremisme yang sering kali menjadi pemicu konflik.
2. Implementasi Moderasi Beragama dalam Penanganan kerusuhan
 - a. Perlunya Menghargai Perbedaan yang ada.

Kita tercipta dengan berbagai ragam jenis agama, suku, ras, dan budaya. Namun Indonesia menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika bermakna berbeda-beda tetapi tetap bersatu jua.

- b. Penguatan moderasi beragama dapat dilaksanakan dengan insersi (penyisipan) Menambahkan materi yang berhubungan dengan moderasi beragama dalam bahan ajar. Dengan menambahkan nilai-nilai moderasi beragama pada bahan ajar, dapat menunjang pendidikan moral kepada anak-anak usia dini dan remaja, guna mengetahui apa itu moderasi beragama sejak dini. Sehingga bisa sedikit menghindari konflik yang berhubungan dengan moderasi beragama.
- c. Kolaborasi dengan beragam elemen.
Terjadinya partisipasi antara lembaga mitra dan lembaga agama. Kemudian disitulah terjadinya kerja sama, yang dapat memperluas jangkauan tentang moderasi beragama.
- d. Dialog Antar Umat Beragama
Hal ini terjadinya keterkaitan pada percakapan yang dilakukan oleh orang-orang dengan tradisi agama yang berbeda untuk saling bertukar pendapat dan saling menghormati. Dialog ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti interaksi sehari-hari, diskusi formal, debat para ahli, hingga aktivisme sosial. Hal ini dapat dilakukan guna membangun keyakinan serta praktik ibadah lebih baik lagi. Dengan memfasilitasi terciptanya kesejahteraan dan ketentraman masyarakat. Dialog antar umat beragama dapat dilakukan dengan baik jika memiliki proporsi awal, yaitu bahwa semua agama yang terdapat di alam semesta ini hanya milik Allah yang maha Agung, percaya bahwa Allah SWT itu benar adanya (Kuri, n.d.).

Faktor Pemicu Kerusuhan dan Pencegahan di Masa Depan

Kerusuhan yang terjadi di Pekalongan pada November 1995 tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipicu oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Situasi sosial yang kompleks, ketidakstabilan ekonomi, serta dinamika politik pada masa itu turut menciptakan ketegangan di masyarakat. Faktor-faktor ini kemudian memperparah sentimen antarkelompok yang akhirnya memicu konflik terbuka. Dalam konteks ini, penting untuk menelaah lebih dalam mengenai faktor-faktor politik, ekonomi, dan sosial yang berperan dalam terjadinya kerusuhan tersebut.

1. Faktor Politik Terjadinya Kerusuhan di Pekalongan Tahun 1995

Kerusuhan di Pekalongan pada November 1995 yang melibatkan konflik antara etnis Tionghoa dan mayoritas Muslim dipengaruhi oleh dinamika politik yang berkembang pada masa itu. Dalam konteks politik Orde Baru, kekuatan politik nasional terpusat pada tiga partai utama, yakni Golkar, PPP (Partai Persatuan Pembangunan), dan PDI (Partai Demokrasi Indonesia). Di Pekalongan, yang mayoritas penduduknya Muslim, dukungan masyarakat sangat besar terhadap PPP, partai yang merepresentasikan kepentingan politik Islam. Fanatisme terhadap PPP sangat terlihat di kalangan masyarakat Pekalongan, hingga mempengaruhi rutinitas sehari-hari mereka. Misalnya, karena warna hijau adalah warna lambang partai PPP, masyarakat biasanya menggunakan warna hijau untuk menutupi besek, wadah nasi yang terbuat dari anyaman bambu ketika ada hajatan. Selain itu, ketika membeli bahan bakar, meskipun ingin membeli tiga liter mereka mengucapkan satu liter sebanyak tiga kali, karena angka satu adalah nomor urut partai tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jawa beragama Islam yang

mendukung PPP dengan tingkat religiusitas yang tinggi, cenderung memiliki fanatisme yang kuat.

Fanatisme ini berakar pada identitas keagamaan yang sangat kuat di kalangan masyarakat Islam di Pekalongan, yang pada tahun 1995 merasa bahwa mereka memiliki kekuatan dominan baik secara politik maupun sosial. Dominasi politik Islam di Pekalongan melalui PPP memperkuat rasa identitas kolektif Muslim sebagai mayoritas. Dalam konteks ini, ketika ada insiden yang melibatkan etnis Tionghoa, seperti yang terjadi dalam kasus dugaan perusakan Al-Qur'an oleh seorang warga Tionghoa, masyarakat Muslim di Pekalongan merasa tersinggung dan marah. Situasi ini memicu reaksi kekerasan yang mengarah pada kerusuhan, Meskipun ada upaya dari petugas polisi dan tokoh masyarakat untuk menenangkan massa agar tidak terprovokasi. Puncak kerusuhan terjadi pada hari Jumat setelah shalat Jumat, ketika ratusan orang menyerang toko-toko dan rumah-rumah etnis Tionghoa, yang semakin menegaskan adanya fanatisme politik yang kuat di kalangan masyarakat Muslim Pekalongan saat itu.

Salah satu faktor politik yang krusial adalah terbatasnya organisasi yang dapat berfungsi sebagai penghubung antara etnis Tionghoa dan masyarakat pribumi. Meskipun telah ada organisasi seperti Badan Komunikasi (Bakom) yang bertugas mengelola hubungan antara pemerintah dan komunitas Tionghoa, organisasi ini ternyata tidak berhasil meredakan ketegangan saat konflik terjadi. Bakom dinilai kurang efektif dalam menangani konflik antar etnis, terutama yang berkaitan dengan isu agama.

Politik nasional yang memfokuskan kekuatan pada Golkar, PPP, dan PDI juga menciptakan suasana politik yang terpolarisasi di tingkat lokal. Dominasi politik Islam melalui PPP di Pekalongan menciptakan kesenjangan antara mayoritas Muslim dan minoritas etnis Tionghoa, yang merasa terasing dari proses politik. Meskipun ada upaya dari kelompok Tionghoa untuk berasimilasi melalui organisasi seperti Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (LPKB), realitas politik tetap menunjukkan bahwa etnis Tionghoa memiliki keterbatasan dalam berpartisipasi secara penuh di arena politik.

Secara keseluruhan, fanatisme politik yang dikaitkan dengan identitas agama, kurangnya interaksi yang harmonis antara etnis mayoritas dan minoritas, serta kegagalan organisasi perantara seperti Bakom untuk meredakan ketegangan, menjadi faktor-faktor utama yang memicu terjadinya kerusuhan di Pekalongan pada tahun 1995 (Rahayu & Sodik, 2016).

2. Faktor Ekonomi Terjadinya Kerusuhan di Pekalongan Tahun 1995

Kerusuhan etnis di Pekalongan pada tahun 1995 tidak bisa dilepaskan dari adanya ketimpangan sosial ekonomi yang tajam antara etnis Jawa dan etnis Tionghoa, yang memicu kecemburuan sosial. Menurut Nurhandiantomo (2004, dalam (Rahayu & Sodik, 2016). Ketimpangan ini telah terjadi sejak masa kolonial, di mana kebijakan Pemerintah Hindia-Belanda menempatkan orang-orang Tionghoa sebagai "golongan perantara" dalam bidang perdagangan. Posisi ini membuat mereka menjadi penghubung antara pusat-pusat perdagangan yang dikuasai oleh orang Eropa dengan masyarakat pribumi. Etnis Tionghoa lambat laun mendominasi sektor perdagangan, industri, dan keuangan. Pada era Orde Baru, pengaruh ekonomi etnis Tionghoa semakin kuat. Kebijakan Presiden Soeharto yang fokus pada pertumbuhan ekonomi memberikan peluang luas bagi etnis Tionghoa untuk mendominasi sektor ekonomi, sementara akses ke bidang lain terbatas bagi mereka. Hal ini menghasilkan banyak konglomerat Tionghoa yang bekerja sama dengan elit penguasa melalui praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Akibatnya,

kecemburuan sosial meningkat di kalangan masyarakat Jawa yang merasa terpinggirkan secara ekonomi.

Di Pekalongan, etnis Tionghoa dikenal sebagai pedagang yang sangat gigih, terutama dalam sektor tekstil dan real estat. Mereka juga memiliki peran penting dalam perkembangan industri batik di daerah tersebut sejak abad ke-19. Namun, dominasi ini menciptakan ketimpangan antara pedagang Tionghoa dan masyarakat Jawa. Pada tahun 1970-an, industri batik tulis mengalami penurunan karena munculnya batik cetak yang diproduksi oleh perusahaan besar, termasuk yang dimiliki oleh etnis Tionghoa

Para pemilik usaha batik tulis mengalami penyingkiran secara bertahap ketika sektor batik cetak mengambil alih pasar, yang menyebabkan status mereka berubah dari pengusaha menjadi buruh untuk para pengusaha Tionghoa. Kecemburuan sosial masyarakat etnis Jawa terhadap kelompok etnis Tionghoa merupakan hasil dari ketidaksetaraan ekonomi ini. Pada akhirnya, kesenjangan ekonomi yang mengakar ini merupakan elemen utama yang berkontribusi terhadap kerusuhan tahun 1995, karena para perusuh dari kelas menengah ke bawah menargetkan toko-toko milik etnis Tionghoa untuk dirusak (Rahayu & Sodik, 2016).

3. Faktor Sosial Terjadinya Kerusuhan di Pekalongan Tahun 1995

Kerusuhan di Kota Pekalongan tahun 1995 merupakan salah satu dari serangkaian konflik sosial yang melibatkan masyarakat pribumi Jawa dan etnis Tionghoa. Salah satu faktor yang paling mencolok adalah kecemburuan sosial yang timbul dari dominasi ekonomi yang dimiliki oleh etnis Tionghoa. Pada masa itu, etnis Tionghoa, meskipun merupakan golongan minoritas, menguasai sebagian besar sektor bisnis dan perdagangan di Pekalongan, sementara masyarakat pribumi Jawa, yang mayoritas beragama Islam, tergolong dalam golongan ekonomi menengah ke bawah. Ketidakseimbangan ekonomi ini menciptakan jarak sosial yang semakin melebar di antara kedua etnis, sehingga memicu rasa ketidakadilan dan kecemburuan dari masyarakat pribumi.

Selain itu, kebijakan diskriminatif yang diberlakukan oleh pemerintah Orde Baru terhadap etnis Tionghoa semakin memperuncing permasalahan sosial. Pemerintah memberlakukan sejumlah aturan yang menekan kebebasan etnis Tionghoa untuk mempertahankan identitas budaya mereka, seperti larangan penggunaan nama Tionghoa, pembatasan dalam merayakan tradisi dan kebudayaan, serta upaya asimilasi paksa melalui berbagai peraturan. Asimilasi ini sering disebut sebagai "asimilasi rekayasa," karena dipaksakan melalui regulasi, bukan terjadi secara alami di masyarakat. Pada saat yang sama, meskipun secara formal mereka diharapkan melebur dengan masyarakat pribumi, secara sosial dan ekonomi mereka tetap dianggap sebagai "asing" yang tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat pribumi.

Karakteristik masyarakat Pekalongan juga memainkan peran penting dalam memicu kerusuhan ini. Kota Pekalongan dikenal sebagai daerah dengan tingkat religiusitas yang tinggi, dan warganya terkenal mudah tersulut emosi, sehingga wilayah ini sering disebut sebagai daerah "sumbu pendek". Dalam konteks ini, perbedaan agama menjadi salah satu pemicu ketegangan yang signifikan. Mayoritas etnis Tionghoa yang beragama non-Muslim berada dalam posisi rentan, terutama ketika sentimen agama dikaitkan dengan isu-isu ekonomi dan sosial. Pada saat kerusuhan terjadi, rumah-rumah ibadah non-Muslim seperti gereja dan vihara menjadi sasaran utama amukan massa, menunjukkan adanya dimensi agama dalam konflik ini.

Lebih lanjut, persaingan ekonomi antara pedagang pribumi dan pedagang Tionghoa juga memperkuat semangat anti-Tionghoa di kalangan masyarakat pribumi. Etnis Tionghoa yang dikenal menguasai sektor ekonomi, terutama perdagangan, sering kali dianggap sebagai ancaman oleh para pedagang kecil pribumi, yang sebagian besar merupakan kaum santri. Kaum santri, yang mengidentifikasi diri mereka dengan ideologi Islam, melihat dominasi ekonomi Tionghoa sebagai hal yang harus dilawan, dan dalam beberapa kasus, Islam menjadi alat pemersatu untuk melawan dominasi tersebut.

Faktor agama juga menjadi pembeda dalam kerusuhan ini. Warga keturunan Arab yang juga kaya secara ekonomi tidak menjadi sasaran amuk massa, karena mereka mayoritas beragama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa agama berperan penting dalam membentuk solidaritas di tengah masyarakat Muslim, sehingga meskipun mereka kaya, mereka tidak dianggap sebagai "musuh" oleh massa. Sebaliknya, etnis Tionghoa yang beragama non-Muslim, meskipun ada yang kaya, tetap dianggap sebagai kelompok yang berbeda dan rentan menjadi sasaran kekerasan. Bahkan di antara etnis Tionghoa sendiri, mereka yang beragama Islam lebih terlindungi dari kerusuhan dibandingkan yang beragama lain (Rahayu & Sodiq, 2016).

Setelah mengidentifikasi berbagai faktor yang memicu terjadinya kerusuhan di Pekalongan pada tahun 1995. Moderasi beragama memiliki peran penting dalam mencegah terulangnya konflik serupa seperti kerusuhan di Pekalongan pada tahun 1995, yang dipicu oleh sentimen agama. Salah satu solusi yang efektif adalah dengan menginternalisasi nilai-nilai moderasi di tengah masyarakat, termasuk toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, dan kerukunan. Generasi Z, yang lahir dan tumbuh di era digital, memainkan peran sentral sebagai agen perubahan sosial dalam menyebarkan moderasi beragama. Mereka memiliki akses luas terhadap informasi dan teknologi, dan menjadi kelompok yang paling sering berinteraksi dengan media sosial, di mana narasi agama, baik moderat maupun ekstrem, tersebar. Oleh karena itu, Generasi Z diharapkan memainkan peran penting sebagai agen perubahan yang proaktif dalam menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama dan menolak narasi kebencian (Helminia Salsabila, 2022). Salah satu langkah konkret yang bisa diambil oleh generasi Z adalah menjadi kontrol sosial di media sosial dengan tidak menyebarkan ujaran kebencian atau provokasi terkait agama, etnis, atau suku. Mereka juga harus menyeleksi konten yang mereka sebar, memastikan tidak ikut menyebarkan narasi yang bersifat provokatif, yang dapat memicu konflik berbasis agama. Di era digital ini, mereka bisa menjadi "polisi moral" dengan melaporkan konten negatif, memerangi hoaks, dan menyebarkan konten edukatif tentang toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Selain itu, generasi Z juga diharapkan mampu menjadi role model yang mengedepankan sikap terbuka dan menghargai perbedaan, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Sikap ini akan membantu meredam potensi radikalisme yang sering kali muncul dari ketidaktahuan atau pemahaman yang sempit terhadap agama (Hamdi et al., 2021).

Selain peran generasi muda, tokoh-tokoh agama di Pekalongan, seperti Habib Luthfi bin Yahya, telah menunjukkan bagaimana dialog antaragama dapat mengurangi ketegangan antarumat beragama. Dengan mendirikan Paguyuban Antar Umat Beriman (PANUTAN), yang menjadi wadah resmi untuk memfasilitasi komunikasi antarumat beragama di Pekalongan. Inisiatif ini menunjukkan bahwa dialog lintas agama merupakan pendekatan yang efektif dalam mengurangi ketegangan antarumat, bukan hanya mengandalkan pendekatan hukum atau keamanan. Kegiatan keagamaan dan aksi sosial bersama juga menjadi sarana yang efektif untuk menjaga kerukunan antarumat beragama. Event keagamaan seperti peringatan Maulid nabi di Kanzus Sholawat Pekalongan, yang dipimpin oleh Habib Luthfi, melibatkan berbagai komunitas

lintas agama dan etnis. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang keagamaan, tetapi juga wadah untuk interaksi dan dialog informal yang memperlerat kerukunan di akar rumput. Kegiatan sosial seperti berbagi makanan saat bulan Ramadan, di mana komunitas Tionghoa ikut serta, menjadi contoh bahwa agama bisa menjadi sarana pemersatu, bukan pemecah belah. Aksi sosial ini memperkuat solidaritas dan menunjukkan bahwa perbedaan agama tidak menghalangi masyarakat untuk saling membantu.

Pendidikan juga memiliki peran penting dalam pencegahan konflik berbasis agama. Pendidikan agama yang moderat dan berbasis dialog lintas agama harus menjadi pendekatan jangka panjang dalam menjaga kerukunan di masa depan. Kurikulum pendidikan agama di sekolah-sekolah perlu menekankan nilai-nilai moderasi dan toleransi sejak dini. Hal ini penting agar anak-anak terbiasa dengan nilai-nilai menghargai perbedaan dan tidak tumbuh dengan pandangan eksklusif atau fanatisme berlebihan terhadap agamanya sendiri (Zuhriyandi, 2023). Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat komitmennya terhadap moderasi beragama, termasuk dengan mendirikan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) (Azhari & Sirait, 2024).

Dengan peran dari generasi muda, tokoh agama, kegiatan sosial, dan pendidikan agama yang moderat, moderasi beragama dapat menjadi strategi yang efektif dalam mencegah konflik di masa depan. Penerapan nilai-nilai moderasi dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui media sosial, dialog antaragama, maupun kegiatan sosial lintas agama, akan menciptakan iklim sosial yang lebih harmonis dan jauh dari potensi konflik yang dipicu oleh perbedaan agama.

Dampak dan Penanganan Kerusuhan

1. Dampak Sosial, Ekonomi dan Politik Kerusuhan November 1995

Dampak sosial yang terjadi akibat kerusuhan November 1995 adalah masyarakat etnis Tionghoa menjadi lebih berhati-hati jika menyangkut agama karena mereka yang menjadi sasaran amukan masyarakat. Demi menjaga keamanan lingkungan banyak petugas keamanan yang keliling ke kampung-kampung untuk memastikan tidak adanya amukan dari masyarakat pada etnis Tionghoa. Akibat kerusuhan itu pula masyarakat etnis Tionghoa kehidupannya tidak seeluas dulu sebelum terjadi kerusuhan karena khawatir tiba-tiba mendapat amukan masa.

Kerugian secara material adalah dampak ekonomi dari kerusuhan November 1995 yang dialami oleh masyarakat etnis Tionghoa. Bangunan seperti pertokoan bahkan rumah-rumah etnis Tionghoa mengalami kerusakan akibat amukan masa yang terjadi dari tanggal 22 November dan puncaknya pada tanggal 24 November 1995. Hasil wawancara dengan salah satu warga sekitar bahwa toko-toko sepanjang jalan Hayam Wuruk tutup lebih awal atau tutup total karena mereka khawatir akan terjadi kerusuhan yang menyebabkan perdagangan mereka rusak. Selain itu, ada beberapa oknum yang sengaja memanfaatkan keadaan dengan melakukan pemerasan terhadap toko dengan cara meminta rokok ataupun kebutuhan lain dengan dalih agar tokoh mereka aman, hal itu dibenarkan oleh Dirhamsyah yang diwawancarai pada Sabtu, 27 Februari 2016 di radio batik kota Pekalongan.

Dampak politik juga tidak ketinggalan ikut terlibat, maka diresmikan lah FPBI yaitu Forum Persaudaraan Indonesia oleh pemerintah kota Pekalongan yang diharapkan kerusuhan November 1995 tidak akan terjadi lagi. Terdapat beberapa tokoh etnis masyarakat di Pekalongan yang bergabung dalam forum tersebut. Tujuannya tidak lain adalah jika suatu saat terjadi perdebatan / konflik serupa mereka bisa mengatasinya dengan segera.

2. Penanganan Kerusuhan November 1995

Pada tahun 1995, konflik sosial di Kota Pekalongan ditangani oleh Pemerintah Kota, Muspida, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat setempat. Pada Kamis, 23 November 1995, Sekretaris Wilayah Daerah (Sekwilda) mengadakan pertemuan dengan para ulama untuk membahas insiden di Jalan Hayam Wuruk dan mencari solusi. Muspida, bersama organisasi masyarakat Islam, para ulama, dan tokoh masyarakat, mengimbau warga untuk tetap tenang dan menjaga persatuan.

Aparat keamanan melakukan penjagaan ketat serta patroli hingga ke pemukiman. Dibantu oleh Batalyon 407 Padmakusuma dari Tegal, aparat memblokir sejumlah jalan. Di Weleri, dekat Kendal, penjagaan diperketat untuk mencegah massa bergerak ke Semarang, wilayah yang dianggap rawan konflik. Pengamanan juga dilakukan di bagian barat Pekalongan hingga ke perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Untuk pencegahan jangka panjang, dibentuk Forum Persatuan Bhinneka Indonesia (FPBI) yang melibatkan tokoh-tokoh etnis di Pekalongan. Forum ini diharapkan dapat menyelesaikan konflik antar etnis dengan cepat. Pemerintah juga mengadakan dialog antar etnis untuk mencegah kesalahpahaman dan menciptakan rasa aman bagi semua kelompok. Posko keamanan didirikan di dekat Jalan Hayam Wuruk pasca-kerusuhan untuk menjaga situasi tetap stabil (Rahayu & Sodik, 2016).

KESIMPULAN

Banyak hal menyebabkan kerusuhan agama di Pekalongan pada November 1995 yang melibatkan masyarakat Tionghoa dan Muslim. Ini termasuk ketidaksetaraan ekonomi, fanatisme politik, dan diskriminasi sosial. Masyarakat mayoritas Muslim, khususnya yang mendukung PPP, menunjukkan fanatisme agama dan politik yang kuat, yang dipicu oleh perbedaan identitas dan ketidaksetaraan sosial dengan etnis Tionghoa yang dianggap menguasai sektor ekonomi. Konflik ini semakin diperburuk oleh kegagalan komunikasi lintas etnis dan kegagalan organisasi seperti Bakom dalam meredam ketegangan.

Moderasi beragama, yang berfokus pada toleransi, dialog, dan penghormatan terhadap perbedaan, memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik. Penguatan moderasi beragama melalui pendidikan, dialog antarumat, dan kegiatan sosial lintas agama diharapkan dapat mencegah konflik serupa di masa depan. Generasi Z, sebagai agen perubahan di era digital, juga memegang peranan krusial dalam menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama melalui media sosial, dan menghindari narasi kebencian.

Dampak dari kerusuhan ini sangat signifikan, terutama terhadap masyarakat etnis Tionghoa yang menjadi target kekerasan, baik secara sosial maupun ekonomi. Selain itu, kerusuhan ini juga menunjukkan pentingnya pendekatan moderasi beragama dalam menciptakan perdamaian dan mencegah kerusuhan yang dipicu oleh sentimen agama. Moderasi beragama melalui pendidikan, kolaborasi lintas agama, dan peran tokoh masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga kerukunan dan mencegah potensi konflik di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifai, A. (2019). Akulturasi Islam Dan Budaya Lokal. *As-Shuffah*, 7(2), 1–17.
- Azhari, T., & Sirait, F. (2024). Moderasi Beragama dalam Tradisi Agama-agama di Asia Tenggara : Implementasi Moderasi Beragama di Indonesia Religious Moderation in the Traditions of Southeast Asian Religions : the Implement. *Book Chapter of*

Proceedings Journey-Liaison Academic and Society, 3(1), 341–349.

- Boboy, J. T. B., Santoso, B., & Irawati, I. (2020). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin. *Notarius*, 13(2), 803–818. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31168>
- Hamdi, S., Munawarah, M., & Hamidah, H. (2021). Revitalisasi Syiar Moderasi Beragama di Media Sosial: Gaungkan Konten Moderasi untuk Membangun Harmonisasi. *Intizar*, 27(1), 1–15. <https://doi.org/10.19109/intizar.v27i1.8191>
- Helminia Salsabila, dkk. (2022). Peran Generasi Z dalam Moderasi Beragama di Era Digital. *Al-Adyan: Journal of Religious Studies*, 3(2), 118. <http://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/aladyan/article/view/4814>
- Kuri, K. (n.d.). *PEMBELAJARAN MODERASI BERAGAMA* :
- Rahayu, R. T., & Sodiq, I. (2016). Konflik Cina-Jawa Di Kota Pekalongan Tahun 1995. *Journal of Indonesian History*, 5(1), 35–42.
- Riady, A. S. (2021). Agama dan Kebudayaan Masyarakat Perspektif Clifford Geertz. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAl)*, 2(1), 13–22. <https://doi.org/10.22373/jsai.v2i1.1199>
- Zuhriyandi, Z. (2023). Harmoni Beragama Dan Pencegahan Konflik: Perspektif Moderasi Menurut Al-Qur'an Dan Alkitab. *MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama*, 3(2), 218. <https://doi.org/10.32332/moderatio.v3i2.8222>